

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu aspek prioritas yang perlu diperhatikan pada negara berkembang. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai sebuah proses pembangunan sistem pemerintahan nasional dalam mencapai tujuan nasional serta sebagai upaya dalam rangka meningkatkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam pembangunan nasional di Negara Indonesia, salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah bidang ekonomi. Jika dilihat dari wilayah Indonesia yang sangat luas, maka diperlukan adanya perombakan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi daerah sehingga pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi menjadi otonomi daerah. Hal tersebut ditujukan untuk lebih dapat memperhatikan daerah-daerah kecil dalam upaya pembangunan terutama di bidang ekonomi (Ananta Prathama, 2022)

Adanya otonomi daerah maka kewenangan pembangunan ekonomi daerah juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah, 2004), yang mana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengembangkan potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah harus dapat dikembangkan, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang terdapat di daerah yaitu melalui sektor UMKM.

Menurut Niode, UMKM merupakan unit usaha yang banyak dikembangkan di Indonesia mengingat peningkatan UMKM di Indonesia cukup baik dan memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan. Hal ini dilihat dari daya tahan UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi kehadiran UMKM memiliki kemampuan besar untuk menciptakan lapangan kerja karena adanya penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan memerangi kemiskinan (Niode, 2019).

UMKM merupakan jenis usaha dengan menggunakan teknologi yang sederhana, tingkat dan akses terhadap kredit rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Dalam hal tersebut, maka UMKM hadir menjadi solusi alternatif yang dapat diandalkan dalam sektor perekonomian di Indonesia. Melihat peran UMKM yang besar, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Kebijakan tersebut termuat dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008)

UMKM memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia, baik dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang digunakan oleh suatu negara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Secara umum, PDB merupakan jumlah produksi barang maupun jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada waktu tertentu. Angka PDB yang tinggi menandakan bahwa terdapat angka produksi yang tinggi

pula. Tingginya angka produksi menandakan bahwa daya beli masyarakat juga tinggi. Sehingga jika angka PDB tinggi, muncul spekulasi bahwa daerah tersebut juga semakin sejahtera. Selain itu, peran nyata UMKM dalam penyerapan tenaga kerja yakni semakin banyaknya jumlah unit usaha, maka kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat (Bulolo et al., 2020). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan maraknya UMKM dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak karena meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat pun ikut meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang ditandai dengan tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia termasuk ke dalam golongan UMKM. Dengan jumlah tersebut, UMKM di Indonesia berhasil memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, dengan angka kontribusi terhadap PDB yang tinggi menandakan bahwa adanya peningkatan nilai produksi yang linear dengan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan kata lain, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja serta mampu menampung tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM yang masif berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memperlihatkan pertumbuhan UMKM yang baik di Indonesia. Kontribusi Koperasi dan UMKM Jawa Timur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 0,56% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 57,25% atau setara Rp 1.361,39 triliun. Sedangkan, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 57,81% atau setara dengan Rp1.418,94 triliun. Adapun pernyataan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dikutip dalam *suarasurabaya.net* sebagai berikut:

“Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur menunjukkan inklusivitas ekonomi Jawa Timur yang didukung oleh 22.484 unit Koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM, baik di sektor pertanian maupun non pertanian serta berbagai dukungan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur”, Sabtu (16/4/2022). Sumber:<https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/kontribusi-koperasi-dan-umkm-untuk-ekonomi-jawa-timur-meningkat-jadi-5781-persen/> diakses pada 8 November 2022.

Walaupun UMKM memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat perkembangannya. Adapun faktor penghambat dalam perkembangan UMKM, diantaranya adalah terkait pemasaran dan permodalan (Asmalidar, 2019). Menurut Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, masih terdapat permasalahan terkait UMKM yang sering terjadi seperti permasalahan produksi, pemasaran, dan pembiayaan (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2022). Maka dari itu, diperlukan adanya upaya penguatan UMKM salah satunya adalah melalui

pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan menjadi salah satu tugas pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM karena UMKM merupakan salah satu kunci dalam peningkatan perekonomian daerah (Siti Nurhalita & Imsar, 2022).

Pemberdayaan UMKM merupakan sebuah usaha dalam hal ini pemerintah untuk menjadikan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki daya agar berkembang kemampuan dan potensinya. Menurut Sudrajat (2018), pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kehidupan ekonomi dasar sebagian besar penduduk, terutama dengan membuka kesempatan kerja dan menekan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM dapat berupa penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Penumbuhan iklim usaha dilakukan sedemikian rupa sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Sedangkan pengembangan usaha dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008).

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu daerah paling barat di Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat pertumbuhan UMKM yang meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

Dalam kurun waktu 3 tahun, peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Ngawi terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2019 jumlah UMKM di Kabupaten Ngawi yaitu sebanyak 84.201 unit, pada tahun 2020 terdapat 84.251 unit, hingga pada tahun 2021 terdapat sebanyak 84.729 unit UMKM di Kabupaten Ngawi (BPS, 2022). Hal tersebut menandakan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir UMKM di Kabupaten Ngawi terus mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Ngawi.

Menurut Dharmawan (2019), penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi secara signifikan positif dipengaruhi oleh kuantitas UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi. Artinya, semakin meningkat kuantitas UMKM di Kabupaten Ngawi maka akan meningkat pula lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ngawi (Dharmawan, 2019). Dengan demikian, pengoptimalan UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi perlu diperhatikan lebih serius. Dalam melakukan pengoptimalan UMKM, pemerintah daerah juga harus memberikan bukti dan kontribusi nyata dalam rangka meningkatkan kualitas dari UMKM melalui berbagai kegiatan, bukan hanya wacana belaka (Salama & Prathama, 2022).

Dalam rangka mengoptimalkan UMKM, tentunya pemerintah daerah harus mengetahui jenis-jenis dan produk unggulan UMKM di daerahnya. Maka dari itu diperlukan adanya identifikasi guna mengetahui produk UMKM apasaja yang dimiliki dan memiliki peluang untuk dimaksimalkan. Salah satu usaha yang banyak

dikembangkan oleh masyarakat yang kemudian menjadi produk unggulan di Kabupaten Ngawi yaitu tempe (tabel 1.1).

Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari kedelai atau bahan lain yang difermentasi dengan “ragi tempe”. Belum jelas kapan pertama kali tempe mulai dibuat tetapi tempe sudah diketahui sejak berabad-abad silam oleh masyarakat Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1814 semasa pemerintahan Sultan Pakubuwono berdasarkan manuskrip Serat Centhini yang ditulis oleh R. Ng. Ronggo Sutrasno, ditemukan bahwa masyarakat Jawa pada abad ke-16 telah mengenal tempe (Badan Standarisasi Nasional, 2012). Dalam hal ini, tempe disebutkan sebagai hidangan bernama *Kadhele Tempe Srundengan* dan *Jae Santen Tempe*. Kata “tempe” diduga berasal dari penyebutan masyarakat Jawa Kuno terhadap tumpi yakni makanan berwarna putih yang terbuat dari tepung sagu.

Indonesia merupakan negara pengasil tempe terbesar di dunia. Berdasarkan hal tersebut, tempe kemudian didaftarkan sebagai warisan kuliner budaya dunia UNESCO oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Upaya mendaftarkan tempe ke UNESCO pada penghujung semester satu tahun 2021, dapat meningkatkan diversifikasi produk olahan tempe sebagai salah satu produk ekonomi kreatif Indonesia. Adapun pernyataan Sandiaga Uno dalam upaya mendaftarkan tempe ke UNESCO yang dikutip dalam *cnnindonesia.com*:

"Harapan kami, ingat tempe ingat Indonesia. Dengan ditetapkan tempe jadi warisan budaya dunia harapan kita akan meningkatkan pengembangan produk-produk olahan tempe sebagai produk kuliner kebanggaan bangsa dan akan membawa tempe untuk roadshow dan promosi kuliner ke internasional."

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210524201644->

[262-646436/tempe-bakal-didaftarkan-jadi-warisan-kuliner-budaya-unesco](https://doi.org/10.26400/262-646436/tempe-bakal-didaftarkan-jadi-warisan-kuliner-budaya-unesco) diakses pada 8 Januari 2023.

Melalui upaya untuk mendaftarkan tempe sebagai salah satu warisan kuliner budaya UNESCO, diharapkan pelaku UMKM tempe dapat terus melakukan inovasi agar memunculkan diversifikasi produk olahan tempe. Masyarakat Indonesia secara umum mengkonsumsi tempe sebagai makanan pendamping nasi, namun dalam perkembangannya tempe diolah dan disajikan sebagai aneka panganan siap saji dan dijual dalam kemasan. Salah satu produk olahan tempe yang populer yaitu keripik tempe. Di Indonesia, produksi keripik tempe tidak dimonopoli oleh satu daerah saja, banyak daerah di Indonesia yang mengembangkan produk keripik tempe. Walaupun keripik tempe banyak dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, namun tiap daerah memiliki cita rasa berbeda yang menjadi keistimewaan dari keripik tempe suatu daerah termasuk keripik tempe khas Ngawi.

Di Kabupaten Ngawi, produk tempe/keripik tempe berada pada tingkat pertama produk unggulan di Kabupaten Ngawi. Menurut BPS Ngawi (2022), usaha tempe/keripik tempe merupakan usaha yang banyak dikembangkan dan menyerap tenaga kerja tertinggi dibandingkan dengan produk unggulan lainnya di Kabupaten Ngawi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Usaha dan Tenaga Kerja Industri Unggulan di Kabupaten Ngawi

Nama Produk	2019		2020		2021	
	Pengusaha	Tenaga Kerja	Pengusaha	Tenaga Kerja	Pengusaha	Tenaga Kerja
Tempe/Keripik Tempe	1.171	3.621	1.207	3.761	1.201	3.745
Kayu Unik	89	945	99	995	99	998
Tas Plastik	2.584	2.715	2.550	2.695	2.525	2.685
Konveksi	13	47	75	150	75	150
Batik Tulis	15	195	15	225	15	215

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, meskipun pada tahun 2021 terdapat penurunan pengusaha produk tempe sebanyak 6 pengusaha, namun usaha produk tempe masih menjadi usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Ngawi. Usaha tempe di Kabupaten Ngawi pada tahun 2021 mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 3.745 orang. Di Kabupaten Ngawi terdapat sentra produksi tempe/keripik tempe salah satunya yaitu di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi.

Desa Karangtengah Prandon merupakan salah satu desa di Kabupaten Ngawi, yang sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha tempe maupun keripik tempe. Sehingga desa ini menjadi salah satu Sentra Industri Keripik Tempe di Kabupaten Ngawi. Munculnya ide untuk menciptakan keripik tempe karena tempe sayur memiliki tenggat kadaluarsa yang pendek sehingga pengusaha lebih memilih untuk mengembangkan usaha keripik tempe dibandingkan memproduksi tempe sayur. Para pelaku usaha tempe/keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon telah dinilai telah mumpuni dalam menjalankan usahanya serta mempunyai pengalaman usaha yang cukup lama sebab usaha ini merupakan usaha turun temurun. UMKM keripik tempe di Kabupaten Ngawi merupakan salah satu UMKM yang saat ini harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam era globalisasi dan menjadi UMKM yang berdaya.

Walaupun usaha tempe/keripik tempe berada pada urutan teratas dan menjadi produk unggulan dengan penyerapan tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Ngawi, namun pada kenyataannya usaha produksi keripik tempe di Ngawi terancam gulung tikar (Jawa Pos Radar Madiun, 2022). Ancaman tersebut

dikarenakan adanya kenaikan harga dari bahan baku pembuatan keripik tempe seperti minyak goreng, tepung dan kedelai yang menyebabkan kenaikan biaya produksi keripik tempe. Selain terancam gulung tikar, adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM keripik tempe di Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Karangtengah Prandon. Permasalahan tersebut meliputi minimnya akses permodalan, akses pemasaran, serta kurangnya promosi (Hemasdika & Nuning Setyowati, 2017). Minimnya akses permodalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon ini dikarenakan lokasi usaha yang mengelompok di satu desa menyebabkan ketidakmerataan modal. Selanjutnya, terkait permasalahan pemasaran disebabkan karena rata-rata pelaku UMKM keripik tempe dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan produksi dan kepastian adanya balik modal, kemudian memasarkan produknya melalui makelar atau dijual melalui pengepul. Sedangkan kurangnya promosi terlihat dari mayoritas pengusaha keripik tempe menjual produk di lingkup lokal.

Serupa dengan penelitian permasalahan diatas, menurut Arsiati & Yulaika (2021) terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon yaitu terkait keterbatasan modal, kurangnya promosi serta strategi pemasaran yang belum memadai. Terkait dengan keterbatasan modal disebabkan karena lokasi UMKM keripik tempe yang mengelompok di satu desa dapat menyebabkan ketidakmerataan bantuan ataupun modal karena keterbatasan dana. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM di Desa Karangtengah Prandon hanya berdasarkan permintaan pasar lokal. Upaya perluasan pasar dengan memanfaatkan media untuk promosi cenderung masih sedikit, sehingga

keberhasilan usahanya belum dicapai secara maksimal. Selain itu, Hawari mengemukakan permasalahan lain yang dihadapi yaitu usaha yang terkonsentrasi dalam satu desa menciptakan persaingan yang ketat antar penjual karena produk yang dijual serupa atau homogen. Sehingga pengusaha yang kurang mengikuti perkembangan zaman akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kualitas produksinya (Hawari, 2022). Adapun permasalahan lain yaitu terkait kultur pelaku UMKM yang cepat puas diri dengan kondisi yang ada. Pelaku UMKM setempat meyakini bahwa selama masih terdapat pembeli, para pelaku UMKM tidak perlu melakukan inovasi. Dengan adanya mindset seperti itu, maka eksistensi keripik tempe Kabupaten Ngawi akan semakin merosot karena kalah bersaing dengan produk lain di era modern ini. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering dialami oleh UMKM keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon yaitu akses permodalan, akses pemasaran dan promosi.

Terkait dengan bantuan permodalan, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah menyalurkan bantuan dana untuk UMKM melalui program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Ngawi. BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro, merupakan salah satu bantuan langsung tunai yang ditujukan untuk masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang tujuannya untuk mendukung dan menjaga kelanjutan usaha mikro serta meningkatkan daya saing serta membantu usaha mikro agar dapat berkembang dengan bantuan dana yang telah diberikan oleh pemerintah serta sebagai bentuk penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 yang mengancam perekonomian Nasional. Sejak bergulir tahun

2020 hingga pertengahan Agustus tahun 2021, dana program BPUM di Kabupaten Ngawi telah cair sebanyak Rp108,093 miliar yang telah disalurkan kepada 44.290 pelaku UMKM di Kabupaten Ngawi dengan masing-masing pelaku UMKM mendapat dana bantuan sebesar Rp1,2 juta. Selain itu, terkait permasalahan pemasaran dan promosi pemerintah Kabupaten Ngawi telah membuat wadah untuk UMKM di Kabupaten Ngawi salah satunya UMKM keripik tempe melalui pengadaan galeri UMKM, pameran dan marketplace yang dikelola oleh dinas yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan UMKM.

Upaya dari pemerintah pusat dalam memberikan bantuan dana serta adanya bantuan pemasaran dan promosi dari pemerintah daerah, pada kenyataannya belum mampu mengatasi permasalahan terkait permodalan, pemasaran dan promosi yang dialami oleh UMKM keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon. Terlebih lagi Pemerintah Kabupaten Ngawi mengklaim bahwa keripik tempe merupakan makanan khas Kabupaten Ngawi. Jika nantinya produk unggulan keripik tempe sudah tidak menjadi makanan khas Ngawi karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, maka akan sangat disayangkan. Hal tersebut dikarenakan produk unggulan memberi kesan yang dapat membantu untuk mempromosikan suatu daerah dan juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat daerah tersebut termasuk Kabupaten Ngawi. Sebagai makanan khas yang menjadi ciri khas Kabupaten Ngawi, harusnya pemerintah daerah lebih memerhatikan lagi permasalahan yang terjadi pada UMKM keripik tempe dan mengupayakan pemberdayaan UMKM keripik tempe salah satunya di Desa Karangtengah Prandon melalui organisasi perangkat daerah terkait.

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Ngawi merupakan tanggungjawab dari Dinas Koperasi dan UKM yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Di dalam Pasal 3 dipaparkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan bantuan dalam urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta wewenang lain yang diberikan oleh Bupati. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran yang optimal dalam membantu UMKM keripiki tempe untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mendukung berkembangnya UMKM di Desa Karangtengah Prandon melalui pemberdayaan UMKM.

Keberhasilan UMKM keripik tempe sebagai salah satu makanan khas Kabupaten Ngawi serta sebagai industri yang banyak dikembangkan oleh masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Ngawi (berdasarkan data tabel 1.1) tidak lepas dari peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngawi. Peran tersebut yaitu meliputi peran dalam pembinaan atau pelatihan terhadap pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM keripik tempe seperti pelatihan digitalisasi pemasaran. Melalui peningkatan kemampuan pelaku UMKM keripik tempe tentu saja akan mempengaruhi peningkatan ekonomi didukung dengan penguatan UMKM keripik tempe dengan didorong adanya peran dari dinas dalam pemberian akses pemasaran melalui pameran UMKM, galeri UMKM serta marketplace yang dikelola Dinas

Koperasi dan UKM; akses permodalan melalui fasilitasi dana kepada pihak ketiga (koperasi dan bank); dan perizinan melalui pemberian kemudahan dalam perizinan secara online.

Adanya peningkatan ekonomi dari UMKM keripik tempe, secara tidak langsung akan menimbulkan lingkungan usaha yang kompetitif terlebih lagi dalam lingkup usaha homogen. Peran dinas dalam menjaga kestabilan lingkungan usaha sangat diperlukan agar tidak ada pelaku UMKM yang saling menjatuhkan sehingga menciptakan lingkungan usaha yang sehat, harmonis, dan kompetitif antar pelaku UMKM keripik tempe serta pemanfaatan limbah usaha agar mengurangi pencemaran lingkungan. Melalui pemaparan diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngawi sebagai lembaga pelaksana yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Ngawi melalui pengelolaan dan pembinaan yang tepat sasaran dan adanya visi yang jelas dan berjalan efektif serta dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih berkembang melalui jejaring kemitraan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, penulis mengambil pendekatan teori pemberdayaan Mardikanto dan Soebianto. Adapun fokus dari teori tersebut yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap **“Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM Keripik Tempe Di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM Keripik Tempe Di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi”

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Mendeskripsikan Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pemberdayaan UMKM Keripik Tempe Di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terkait upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi terutama pada UMKM keripik tempe Di Desa Karangtengah Prandon. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut ataupun penyempurnaan dari penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat mempertajam pengetahuan tentang upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam pemberdayaan UMKM keripik tempe di Desa Karangtengah Prandon. Penelitian ini sebagai

implementasi penerapan teori atau pengetahuan terutama dari Mata Kuliah Pemberdayaan Sosial yang diperoleh pada saat perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penunjang pendidikan dan hasil riset dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pebanding bagi peneliti lainnya, serta sebagai acuan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c) Bagi Dinas Koperasi dan UKM

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada jajaran petinggi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ngawi untuk menjalankan perannya sesuai dengan amanat dari aturan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bahan evaluasi serta masukan untuk Dinas Koperasi dan UKM agar lebih baik lagi. Sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan terhadap sektor usaha mikro terutama pemberdayaan UMKM di Kabupaten Ngawi.